



**KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN  
BERBASIS PENYIAPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
DI KOTA PAREPARE**

**(Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare)**

***SUSTAINABLE URBAN AREA DEVELOPMENT BASED ON  
PREPARING GREEN OPEN SPACE FOR URBAN AREA  
IN PAREPARE CITY***

*(Case Study: Bacukiki District, Parepare City).*

**Andi Mirza Azilia<sup>1</sup>, Mary Selintung<sup>1</sup>, Syafri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa

Email: [mirzaazilia@gmail.com](mailto:mirzaazilia@gmail.com)

---

**Artikel info**

**Artikel history:**

Diterima; xx-xx

Direvisi:xx-xx

Disetujui;xx-xx

**Abstract.** *The issue of sustainability has become popular, the trigger is the phenomenon of global warming which is worrying about the continuity of life on Earth. The symptom is an increase in the average temperature on Earth caused by the effects of greenhouse gases. The aim of the study is to determine the achievement of fulfilling Green Open Space in the Parepare Urban Area in Bacukiki District.*

*The research methodology used is based on a qualitative approach through interpretation of secondary data that is available and accessible to the public. Green open space is an important function in the allocation of land use for each area which functions to maintain ecosystem balance. In accordance with statutory provisions, the amount is set at 30% for green open space functions with a proportion of 20% public green open space and 10% private green open space. In its implementation, most regions have not succeeded in meeting the achievements according to the stipulated amounts.*

*This research aims to determine the size of green open space and identify the strategies carried out in order to fulfill the provision of green open space to achieve the required targets. Using a descriptive approach, this research was carried out to obtain two types of data including data on the existing area of public green open space and data on strategies for providing green open space.*

*Data on the area of green open space was obtained through digitized image interpretation and validated with a ground survey, while data on the strategy for providing green open space was obtained through secondary sources from the 2021 South Sulawesi Provincial Public Works and Spatial Planning Service report. Strategy to increase the*

---

---

*area of public green open space through planting trees along roads, land acquisition for green areas in settlements, and clearance of river borders from buildings for re-function as green open spaces. The increase has been quite slow and the area obtained has not been able to increase the green open spaces significantly. Another strategy is needed to increase green open space by starting to think about alternatives by increasing private green open space.*

*Keywords: Sustainable Development, Green Open Space, Urban Area..*

**Abstrak.** Isu keberlanjutan menjadi populer, pemicunya adalah fenomena pemanasan global yang mengawatirkan keberlangsungan kehidupan di Bumi. Gejalanya adalah meningkatnya suhu rata-rata di Bumi yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui capaian pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Parepare di Kecamatan Bacukiki.

Metodologi penelitian yang digunakan didasarkan pada pendekatan kualitatif melalui interpretasi data sekunder yang tersedia dan dapat diakses oleh umum. Ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu fungsi penting dalam alokasi peruntukan setiap wilayah yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Sesuai ketentuan peraturan perundangan, ditetapkan besaran 30% untuk fungsi RTH dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dalam pelaksanaannya sebagian besar wilayah belum berhasil memenuhi capaian sesuai besaran yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran RTH dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan dalam rangka memenuhi penyediaan RTH untuk mencapai target yang disyaratkan. Menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dua jenis data mencakup data luas eksisting RTH publik dan data strategi penyediaan RTH.

Data luas RTH diperoleh melalui interpretasi citra yang didigitasi dan divalidasi dengan ground survey, sementara data strategi penyediaan RTH diperoleh melalui sumber sekunder dari laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Maka diperlukan strategi untuk meningkatkan RTH dengan mulai berpikir alternatif melalui peningkatan RTH privat dan pemenuhan RTH Publik.

Kata Kunci: keberlanjutan pembangunan, Ruang Terbuka Hijau, Wilayah Perkotaan.

---

**Keywords:**  
*Sustainable  
Development,  
Green Open Space,  
Urban Area.*

---

**Corresponden author:**  
Email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com)



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

---

## **PENDAHULUAN**

*Sustainable City* merupakan bentuk dari Sustainable Development yakni pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa perlu menurunkan kemampuan generasi yang akan datang. Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan atas aspek lingkungan yang berkelanjutan melainkan bersumber dari masyarakat berkelanjutan.

Keberlanjutan memiliki makna terjaga secara stabil kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan pengembangan potensi lingkungan atau keunikan masyarakatnya serta kondisi lingkungan alam yang semakin baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan (*ecology*), ekonomi (*economy*) dan sosial masyarakat (*social*) (Budihardjo, 1999).

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan adalah melalui P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) dengan pengembangan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Pembangunan RTHKP berupa Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, Taman Wisata, Tempat Pemakaman, pekarangan, pertanian dan perkebunan.

Pengembangan RTH diajukan pemerintah melalui PERDA Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Komposisi RTH daerah adalah 30 persen terdiri dari RTH publik (20 persen) dan RTH privat (10 persen). Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare keberadaan RTH publik di Kota Parepare belum memenuhi 20 persen namun privat keberadaannya lebih dari 10 persen.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui perwujudan kota yang berkelanjutan dimasa depan adalah dengan melakukan analisis skenario. Melalui skenario kita berusaha melihat masa depan dengan berbagai model. Secara mudah skenario dapat dikatakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa depan (Schewarts, 1991).

Analisis skenario pengembangan dapat dilakukan dengan mengetahui perencanaan pengembangan RTH. Melalui perencanaan, fenomena implementasi kebijakan dimasa depan dapat diberikan. Sehingga skenario kebijakan dapat digunakan untuk mengetahui dan memudahkan perumus kebijakan dalam melakukan pembangunan yang tepat sasaran di masa mendatang.

## **METODE**

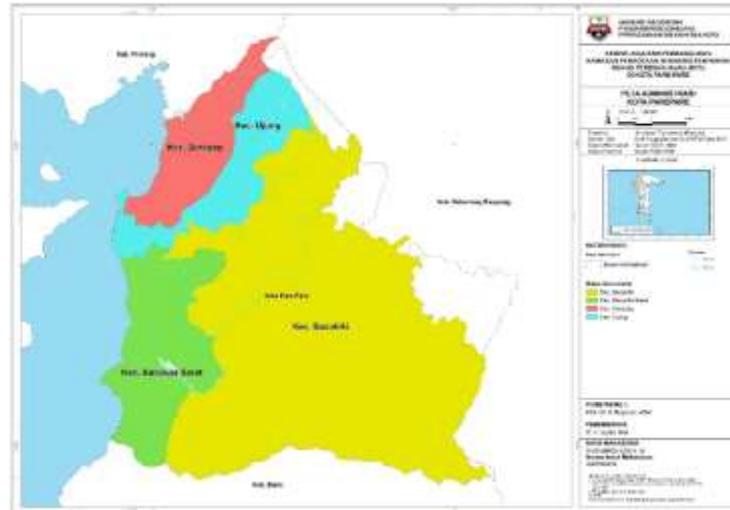
### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian yaitu pada area Kecamatan Bacukiki terbagi atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan olahraga. Pemanfaatan kawasan di Kecamatan Bacukiki cukup variatif sehingga dapat diperbandingkan dengan penyiapan ruang terbuka hijau.

Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Kecamatan Bacukiki merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang. Adapun letak geografis antara 4°0'49.25" LS dan 119°39'6.30.52"BT. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pinrang
2. Sebelah Timur: Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki
3. Sebelah Selatan: Kelurahan Lumpue dan Watang Bacukiki
4. Sebelah Barat: Kelurahan Sumpang Minangae

Luas Wilayah Penelitian adalah 1.718 Ha. Secara administratif Wilayah penelitian terdapat pada 3 Kelurahan



**Gambar 1.** Peta Administrasi Lokasi Penelitian

## **b. Variabel Penelitian**

Variabel merupakan objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan memperoleh informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Variabel penelitian ini yaitu ekspansi ruang atau perkembangan kota, tipologi perkotaan, morfologi, dan kondisi ruang terbuka hijau di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare. Untuk penilaian status keberlanjutan maka variabel yang diamati yaitu dimensi ekologi, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi kelembagaan.

## **c. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Studi literatur, yaitu Penelusuran terhadap berbagai literatur dilakukan untuk memperoleh data awal dan data pendukung selama proses penelitian.

## **d. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data pada penelitian ini terbagi atas beberapa tahapan yaitu :

- 1) Identifikasi model perkembangan kota;
- 2) Analisis tipologi Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- 3) Analisis morfologi Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- 4) Analisis kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare; dan
- 5) Analisis keberlanjutan pembangunan berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare.

### **1. Identifikasi model perkembangan kota**

Model perkembangan kota diidentifikasi berdasarkan data citra periode 2011 – 2021. Data yang telah diunduh kemudian diolah menggunakan software ArcGIS untuk memperoleh perbandingan perkembangan kota, khususnya sebaran pemukiman. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui model perkembangan kota yang sesuai dengan lokasi penelitian.

### **2. Analisis tipologi**

Analisis tipologi wilayah penelitian dilakukan berdasarkan peta rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang telah tersedia. Peta RTRW tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi massa bangunan dan ruang sehingga pola dan tekstur lokasi penelitian dapat diketahui. Proses analisis menggunakan bantuan piranti lunak ArcGIS.

### **3. Analisis morfologi**

Analisis morfologi wilayah penelitian menggunakan peta RTRW sebagai acuan. Berdasarkan peta RTRW yang telah tersedia maka dilakukan analisis deskriptif untuk menentukan bentuk lokasi penelitian, struktural, fungsional, dan visual. Proses analisis menggunakan bantuan piranti lunak ArcGIS.

### **4. Analisis kondisi ruang terbuka hijau**

Kondisi aktual ruang terbuka hijau di lokasi penelitian diamati dengan dua metode yaitu melalui peta RTRW dan peta pemetaan kawasan RTH. Melalui analisis data citra RTRW maka dapat diketahui kondisi fisik dan fungsi sedangkan hasil survei akan memeriksa hasil

data citra serta memberi informasi mengenai struktur dan kepemilikan.

5. Analisis Skenario

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa skenario. Scenario Planning dibuat pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang mungkin muncul di masa depan karena adanya perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi fenomena sosial, yakni proses kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Nganjuk, serta analisisnya dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare:
  - a. Pengembangan RTH Publik berdasarkan Kegiatan Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021; dan
  - b. Pengembangan RTH Privat Berdasarkan Kegiatan Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021.
- 2) Pengembangan RTH dari aspek pengembangan sosial, ekonomi, lingkungan
- 3) Pengembangan Analisis RTH Berdasarkan analisis *Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting* (TAIDA).
- 4) Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat pengembangan RTH dalam mewujudkan *sustainable city*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Kebijakan

#### a. RTRW Kota Parepare

Muatan kebijakan terkait ruang terbuka hijau pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 RTH publik yang telah ada di Kota Parepare meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.968 ha atau sekitar kurang lebih 20 persen dari luas wilayah Kota Parepare yang meliputi:

- 1) Taman kota terdistribusi di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas kurang lebih 22 ha;
- 2) Kawasan taman hutan raya, yang terletak di kompleks hutan Alitta Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 84 ha;
- 3) Kawasan kebun raya, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah dan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 13 ha;
- 4) Kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang dan Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung (eks kompleks gabungan dinas jalan Ganggawa) dengan luas kurang lebih 2 ha;
- 5) Pemakaman umum dan swasta terletak di Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat seluas kurang lebih 22 ha;
- 6) Daerah penyangga hutan lindung (hutan plasma nutfah) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki seluas kurang lebih 120 ha;
- 7) Kawasan hutan kota meliputi kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat, kecamatan Ujung, dan kecamatan Soreang dengan luas kurang lebih 10 ha;
- 8) kawasan sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah Kota Parepare dengan luas kurang lebih 1.088 ha;
- 9) kawasan sempadan pantai tersebar di wilayah pesisir Kota Parepare dengan luas kurang lebih 194 ha;
- 10) kawasan agrowisata di kelurahan Watang Bacukiki kecamatan Bacukiki dan di kelurahan Lemoe kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 398 ha; dan lapangan olahraga/lapangan terbuka hijau tersebar di Kota Parepare dengan luas kurang lebih 15 ha.

#### b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Parepare

Secara khusus pemerintah Kota Parepare mengeluarkan peraturan Walikota Parepare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. RTH Publik yang disediakan ditetapkan dalam bentuk Unit RTH Publik atau Kelompok RTH Publik. Unit RTH Publik adalah satuan luas sebuah RTH Publik yang berdiri sendiri, dengan pengelolaan yang

dilakukan secara tersendiri oleh Pemerintah Daerah. Kelompok RTH Publik adalah jumlah satuan luas dari beberapa RTH yang berada pada satu wilayah Kelurahan. Penyediaan lahan RTH Publik dilakukan melalui:

- 1) setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH paling kurang 10% dari lahan yang ditetapkan sesuai rencana tapak (*site plan*);
- 2) setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 8 (delapan) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada salah satu sisinya, dengan lebar pedestrian paling-kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- 3) setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling- kurang 15 (lima belas) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada kedua sisinya, dengan lebar pedestrian paling kurang 3 (tiga) meter;
- 4) setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
- 5) bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau lebih, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan lahan RTH pengganti di tempat lain, dengan luas sebesar 20% dari luas lahan usahanya;
- 6) bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non- lahan/nonpermanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri (*vertical-garden*) atau taman atap (*roof-garden*), dengan luas disesuaikan kondisi dan kebutuhan; dan
- 7) pembangunan kawasan industri yang memiliki luas paling kurang 50 hektar, wajib ditetapkan RTH Hutan Kota di sekelilingnya (sebagai green belt/sabuk hijau), kecuali pada sisi yang terdapat jalan primer, dengan lebar RTH paling kurang 10 meter.

B. Profil Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bacukiki

a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bacukiki

Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Kecamatan Bacukiki merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang. Adapun letak geografis antara 4°0'49.25" LS dan 119°39'6.30.52"BT. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:

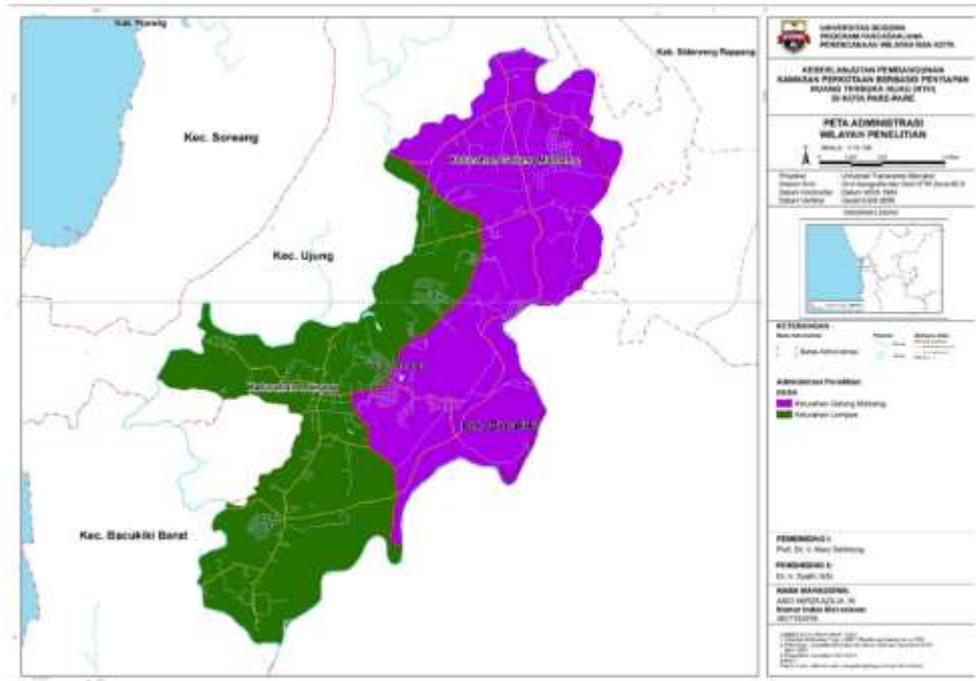
- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pinrang
- 2) Sebelah Timur: Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki
- 3) Sebelah Selatan: Kelurahan Lumpue dan Watang Bacukiki
- 4) Sebelah Barat: Kelurahan Sumpang Minangae

Luas Wilayah Penelitian adalah 1.718 Ha. Secara administratif Wilayah penelitian terdapat pada 3 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Luas WP dan Sekitarnya

No.	Kel/Desa	Luas (Ha)
1	Kelurahan Bukit Harapan	535.37
2	Kelurahan Galung Maloang	619.12
3	Kelurahan Lompoe	564.86
<b>Jumlah</b>		<b>1.718</b>

Sumber: Hasil Delineasi, Tahun 2022



Gambar 2 Peta Administrasi Wilayah Penelitian

**b. Sebaran RTH Kawasan Perkotaan Bacukiki di Kota Parepare**

Pembangunan dan penyediaan RTH di Kota Parepare hingga saat ini cukup bervariasi, dengan luas lahan RTH yang tersedia kurang lebih 64.21 ha atau sekitar 5.22% dari luas kawasan terbangun di perkotaan. Hal tersebut belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 20%, sehingga masih memerlukan lahan peruntukan RTH baru seluas 182,02 ha.

Terdapat selisih antara hasil survei inventarisasi dan pemetaan RTH di Kota Parepare dengan hasil dari program kerja Kementerian PUPR dalam kegiatan "Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Parepare".

Di mana hasil dari kegiatan itu menunjukkan luas RTH Eksisting Kota Parepare seluas 1.763 ha. Data tersebut bersumber dari Bappeda Kota Parepare tahun 2012 dan cukup berbeda signifikan. Namun dalam kegiatan ini data sebaran RTH eksisting bersumber dari RTRW Kota Parepare tahun 2011 – 2031.

Hasil survei dan identifikasi sebaran RTH di Kota Pare-Pare, menunjukkan, RTH yang terdapat di Kota Parepare sebanyak 92 unit yang tersebar pada beberapa titik lokasi. Adapun jenis RTH yang tersedia berupa taman kota, rimba kota dan pemakaman. Secara rinci luas RTH di Kota Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:

**a. Profil dan Kualifikasi RTH Kawasan Perkotaan Kecamatan Bacukiki**

Spesifikasi setiap RTH yang terdapat di Kota Pare-Pare, khususnya di Kecamatan Bacukiki cukup bervariasi, dan menyesuaikan peruntukan atau jenis RTH yang tersedia. Adapun profil RTH secara umum yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, meliputi:

1) Taman Kota

RTH berupa taman kota hingga saat ini tersedia sebanyak 58 unit, dengan memanfaatkan lahan sekitar 26,26 ha. Umumnya taman kota yang terbangun memiliki sistem penyerapan air yang cukup bagus, dengan rata-KDH yang tersedia berkisar antara 8-90% dari luas RTH, didominasi tanaman hias, dan dilengkapi oleh fasilitas taman yang cukup memadai seperti, bangku taman, lampu taman, papan informasi dan system jaringan infrastruktur. Secara spesifik RTH berupa taman kota di Kota Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:



**Gambar 3** Visualisasi Taman kota di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

2) Rimba Kota

RTH dengan kategori Rimba Kota di Kota Pare-Pare, terdapat pada 1 lokasi, dengan luas total kurang lebih 13,89 ha. Unit RTH rimba kota dengan ID PR-20 merupakan hutan yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Pare-Pare dengan memberikan nama lokasi tersebut dengan nama Kebun Raya Jompie. Vegetasi dan sarana prasaran di lokasi tersebut sangat menunjang dari segi pemanfaatan lahan sebagai kawasan RTH yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung di kawasan tersebut.



**Gambar 4** Visualisasi Rimba kota di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

3) Pemakaman

Taman pemakaman merupakan klasifikasi zona RTH, yang sebarannya sebanyak 33 lokasi di Kota Pare-Pare. Luas total lahan peruntukan pemakaman kurang lebih 24,06 ha, spesifikasi pada tabel berikut:



**Gambar 5** Visualisasi Taman Pemakaman di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

## E. Arah Strategi Pemenuhan RTH

### 1. Analisa SWOT

Analisis strategi pemenuhan kebutuhan proporsi RTH Publik di kawasan perkotaan dalam lingkup wilayah Ajatappareng diintegrasikan kedalam analisis SWOT yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sementara analisis lingkungan eksternal mencakup peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan alternatif strategi yang tepat dalam penyelenggaraan RTH Publik di wilayah Ajatappareng.

Sebagai gambaran bahwa metode SWOT merupakan salah satu metode yang seringkali digunakan dalam suatu perencanaan strategi, dan sangat implikatif di dalam analisisnya. SWOT akan mencari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor peluang yang dihadapi, sehingga seringkali disebut juga sebagai metode analisis situasi. Penyajian hasil identifikasi disusun dengan menggunakan matriks SWOT yang ditunjukkan pada Gambar berikut:

	<b>Strength (S)</b> Faktor-faktor kekuatan yang berasal dari internal kawasan	<b>Weaknesses (W)</b> Faktor-faktor kelemahan yang berasal dari internal kawasan
<b>Opportunities (O)</b> Faktor-faktor peluang pengembangan yang berasal dari eksternal kawasan	<b>Strategi S-O</b> Rumusan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi W-O</b> Rumusan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>Treaths (T)</b> Faktor-faktor ancaman yang berasal dari eksternal kawasan	<b>Strategi S-T</b> Rumusan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b>Strategi W-T</b> Rumusan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Berdasarkan peraturan yang berlaku dan karakteristik penyelenggaraan, maka arahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan RTH Publik di kawasan perkotaan dalam lingkup wilayah Ajatappareng mengacu kepada isu-isu strategis pada tiga aspek yaitu aspek pemerintahan, aspek kerjasama swasta/masyarakat dan aspek teknis pengelolaan RTH.

Merujuk pada Matriks analisa SWOT (Gambar 5.14), faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) terkait pemenuhan kebutuhan RTH Publik di kawasan perkotaan di wilayah Ajatappareng ditunjukkan pada tabel berikut:

	<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
	1. Penguatan program pembangunan dan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan Resnstra/Renja SKPD	1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan tata ruang perkotaan yang sesuai dengan peruntukannya
	2. pengalokasian ruang RTH Perkotaan khususnya RTH Publik minimal 20%, melalui penetapan RTRW dan RDTR	2. Peningkatan kepedulian decision maker dalam menambah jumlah dan luasan RTH Publik
	3. Penyusunan dan penguatan legalitas Master Plan RTH pada setiap kawasan perkotaan	3. Pengoptimalan koordinasi setiap SKPD/OPD terkait dalam penyelenggaraan RTH
	4. melalui penetapan SK atau Perwali/Perbup tentang RTH	4. Menghijaukan bangunan (green roof / green wall).
	5. Membangun lahan hijau baru perluasan RTH Publik melalui dan pembelian lahan terutama lahan-lahan potensial	5. Mengakuisisi RTH privat untuk mencapai target dengan cara membuat aturan yang ketat terhadap pelaksanaan KDH (pengendalian) dan memberikan kompensasi insentif dan disinsentif

	6. Pengoptimalan fungsi ekonomi setiap RTH publik yang potensial sehingga dapat membentuk sistem BANK RTH untuk mendukung pengelolaan dan penyediaan RTH publik baru	6. Mengembangkan koridor ruang hijau kota.
	<u>Strategi S-T</u>	Strategi W-T
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.</li> <li>2. Pemberian <i>punishment</i> bagi swasta dan masyarakat yang melanggar terkait penyelenggaraan RTH</li> <li>3. Pelibatan dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat melalui pendekatan budaya</li> <li>4. Pengotimalan fungsi sosial-budaya setiap RTH sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari RTH</li> <li>5. Mengakomodasi simbol budaya/kearifan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan melalui sosialisasi pentingnya keberadaan RTH</li> <li>2. Pemberian <i>reward</i> (insentif) bagi pihak yang mendorong perwujudan dan pemeliharaan RTH</li> <li>3. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak</li> </ol>

Tabel Matriks Analisis Faktor Internal dan Eksternal

<b>Faktor</b>	
<p><b>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang dan peraturan daerah sangat mendukung dalam penyelenggaraan RTH</li> <li>2. Ketersediaan SDM yang memadai</li> <li>3. OPD Pelaksana sudah jelas</li> <li>4. Masih tersedianva lahan tak terbangun yang cukup luas dan memungkinkan untuk dikonversi dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH</li> <li>5. Karakteristik sosial dengan tingkat pendidikan yang memadai</li> <li>6. Karakteristik budaya (Bugis- Makassar)</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen yang masih belum maksimal dalam hal realisasi kebijakan rencana tata ruang dan penyediaan RTH</li> <li>2. Kepedulian <i>decision maker</i> dalam menambah iumlah dan luasan RTH Publik masih kurang</li> <li>3. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan penyediaan RTH baru masih minim</li> <li>4. Koordinasi setiap SKPD yang terkait dalam hal penyelenggaraan RTH masih</li> </ol>
<b>Faktor</b>	
<p><b>Peluang (<i>Opportunities</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan wilawah yang memiliki perkembangan infrastruktur yang terus ditingkatkan baik dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.</li> <li>2. RTH dapat didesain untuk meningkatkan nilai estetika. ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah</li> <li>3. Lahan-lahan potensial untuk Penyediaan RTH baru, sudah teridentifikasi</li> </ol>	<p><b>Ancaman (<i>Treaths</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Densifikasi terus meningkat dari waktu ke waktu seiring perkembangan kota sehingga lahan tak terbangun akan terus berkurang</li> <li>2. Semakin berkembangnya iumlah dan aktivitas industri yang menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat</li> <li>3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan fungsi pentingnva RTH.</li> </ol>

4. Masih tersedia lahan dengan harga yang terjangkau	4. Kurangnya apresiasi masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau.
--	--

Sumber: Hasil Survei dan Analisa Data Tahun 2021

Berdasarkan faktor internal dan eksternal pada Tabel 5.15. maka arahan strategi-strategi dalam penyelenggaraan RTH di kawasan perkotaan dalam cakupan wilayah Kecamatan Bacukiki sesuai analisa SWOT, diuraikan sebagai berikut:

Tabel Matriks Analisis SWOT

	KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
<b>PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
	1. Penguatan program pembangunan dan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan Resnstra/Renja SKPD.	1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan tata ruang perkotaan yang sesuai dengan peruntukannya.
	2. pengalokasian ruang RTH Perkotaan khususnya RTH Publik minimal 20%, melalui penetapan RTRW dan RDTR	2. Peningkatan kepedulian decision maker dalam menambah jumlah dan luasan RTH Publik
	3. Penyusunan dan penguatan legalitas Master Plan RTH pada setiap kawasan perkotaan	3. Pengoptimalan koordinasi setiap SKPD/OPD terkait dalam penyelenggaraan RTH
	4. melalui penetapan SK atau Perwali/Perbup tentang RTH	4. Menghijaukan bangunan ( <i>green roof / green wall</i> ).
	5. Membangun lahan hijau baru perluasan RTH Publik melalui dan pembelian lahan terutama lahan-lahan potensial	5. Mengakuisisi RTH privat untuk mencapai target dengan cara membuat aturan yang ketat terhadap pelaksanaan KDH (pengendalian) dan memberikan kompensasi insentif dan disinsentif
6. Pengoptimalan fungsi ekonomi setiap RTH publik yang potensial sehingga dapat membentuk sistem BANK RTH untuk mendukung pengelolaan dan penyediaan RTH publik baru	6. Mengembangkan koridor ruang hijau kota.	
<b>ANCAMAN (<i>THREATS</i>)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
	1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun. 2. Pemberian <i>punishment</i> bagi swasta dan masyarakat yang melanggar terkait penyelenggaraan RTH 3. Pelibatan dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat melalui pendekatan budaya 4. Pengoptimalan fungsi sosial-budaya setiap RTH sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari RTH 5. Mengakomodasi simbol budaya/kearifan	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan melalui sosialisasi pentingnya keberadaan RTH 2. Pemberian <i>reward</i> (insentif) bagi pihak yang mendorong perwujudan dan pemeliharaan RTH 3. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak lanjut, dan kelembagaan peran komunitas hijau di masing-masing wilayah perkotaan.

Berdasarkan hasil dari analisa SWOT, maka arahan strategi penyelenggaraan RTH untuk mendukung pemenuhan proporsi RTH di kawasan perkotaan dalam cakupan wilayah Kecamatan bacukiki diuraikan pada bahasan berikut ini:

## F. Kebijakan dan Strategis Pengembangan RTH Kawasan Perkotaan Bacukiki

### 1. Strategi Pemerintah

Arahan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH Publik di wilayah Perkotaan Kecamatan Bacukiki dengan

memanfaatkan potensi kekuatan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kekurangan dan meminimalisir ancaman pada aspek legalitas/pemerintahan, yaitu:

- a) Mendorong kebijakan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD sebagai salah satu muatan strategis dalam pembangunan daerah.
- b) Penguatan program pembangunan dan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJMD dan Resnstra/Renja SKPD.
- c) Penguatan aspek spasial dan pengalokasian ruang RTH Perkotaan khususnya RTH Publik minimal 20%, melalui penetapan RTRW dan RDTR.
- d) Mendorong penyusunan dan penguatan legalitas *Master Plan* RTH pada setiap kawasan perkotaan.
- e) Penguatan legalitas setiap obyek RTH melalui penetapan SK atau Perwali/Perbup tentang RTH.
- f) Peningkatan kepedulian *decison maker* dalam menambah jumlah dan luasan RTH Publik.
- g) Pemerintah Daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan PERDA terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum.

## **2. Strategis Swasta/Pengembang**

Arahan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH Publik di wilayah perkotaan Kecamatan Bacukiki dengan memanfaatkan potensi kekuatan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kekurangan dan meminimalisir ancaman pada aspek swasta dan masyarakat, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan melalui sosialisasi dan pendekatan budaya akan pentingnya keberadaan RTH.
- b) Pelibatan dan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta (pengembang) dan masyarakat dalam penyediaan dan mengelola RTH Publik.
- c) Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau.
- d) Pemberian reward (insentif) bagi pihak yang mendorong perwujudan dan pemeliharaan RTH Publik.
- e) Pemberian punishment bagi pihak yang melanggar peruntukan ruang dan penyelenggaraan RTH.

## **3. Aspek Teknis**

Arahan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH Publik di wilayah perkotaan masing- masing di Wilayah Kecamatan Bacukiki dengan memanfaatkan potensi kekuatan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kekurangan dan meminimalisir ancaman pada aspek teknis penyelenggaraan RTH, yaitu:

- a) Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.  
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air (*water retention*), daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis, dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.
- b) Membangun lahan hijau baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan  
Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ/danau buatan terutama lahan-lahan yang terbengkalai termasuk lahan-lahan yang masuk dalam kawasan sempadan sungai, waduk dan pantai
- c) Mengembangkan koridor ruang hijau kota.  
Koridor ruang hijau kota merupakan urban park connector yang menghubungkan RTH satu dengan lainnya di setiap kota. Koridor diciptakan dengan menanami pohon besar disepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, tepian badan

- air situ dan waduk, sempadan rel kereta api dan dapat dijadikan sebagai transportasi kendaraan bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.
- d) Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota. Akuisisi dilakukan dengan menerapkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah daerah.
  - e) Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting. Optimalisasi fungsi ekologis RTH eksisting diantara melalui revitalisasi kawasan hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air serta penanaman rumput pada taman lingkungan perumahan yang diperkeras serta Penataan dan Penambahan Jumlah Vegetasi pada RTH-RTH Eksisting
  - f) Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*). Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.

## KESIMPULAN

Ruang terbuka hijau merupakan unsur esensial dari sebuah wilayah perkotaan, dalam menciptakan pembangunan kota diharuskan berwawasan lingkungan. Hal tersebut telah disampaikan dalam Deklarasi Rio 1992. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan hal wajib, sebagai pemenuhan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam yang dimiliki saat ini harus dirasakan juga oleh generasi yang akan datang. Berada di iklim tropis membuat Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Hal tersebut merupakan hal yang baik bagi Negara Indonesia. Banyak negara-negara yang mengalami krisis sumber daya alam (SDA), Indonesia dapat menambah devisa dengan cara berdagang hasil SDA ke negara lain. Memiliki iklim yang baik membuat Indonesia mudah menciptakan kawasan hijau, pembangunan kawasan hijau telah di atur dalam UU Nomor 26/2007 Tentang Penataan Ruang, berlandaskan Deklarasi Rio 1992 UU Tata Ruang Tercipta.

Kawasan hijau identik dengan taman kota, akan tetapi berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2007, bukan hanya taman kota saja yang digolongkan sebagai RTH. Kawasan Kecamatan Bacukiki di Kota Parepare dikenal dengan tematik yang beragam, namun hal tersebut tidak menambah besaran RTH di Kawasan Perkotaan Bacukiki dikarenakan hanya memperbaiki dari kualitas yang sebelumnya, pemenuhan besaran RTH yang diatur dalam UU Penataan Ruang haruslah dipenuhi, pasalnya hal tersebut merupakan pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan berlandaskan prinsip berkelanjutan.

Secara teknis setiap kawasan perkotaan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah melakukan perencanaan penambahan RTH eksisting dari RTH rencana dalam penyusunan RDTR wilayah perkotaan atas Kota Parepare. Walaupun dalam analisis dari RTH eksisting ditambah dengan RTH rencana (potensial) masih belum memenuhi aspek lahan terbangun, luas wilayah perkotaan dan jumlah penduduk di beberapa wilayah perkotaan kecamatan Bacukiki, namun secara perhatian dari pemerintah setiap kawasan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah serius dalam menanggapi hal yang terkait dengan lingkungan dalam hal ini pemenuhan RTH wilayah perkotaan.

## SARAN

Dalam mendukung Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pare-Pare terdapat beberapa rekomendasi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Beberapa rekomendasi dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan RTH rencana (potensial) sebagai lahan RTH eksisting demi menambah luasan dari RTH masing-masing wilayah perkotaan di Kecamatan Bacukiki.
2. Dari aspek lahan terbangun, luas wilayah perkotaan dan jumlah penduduk masih belum memenuhi dari standar aturan-aturan yang ada, sehingga diperlukan penambahan lahan untuk mencapai 20% target dari luasan RTH publik.
3. Memanfaatkan lahan yang telah direkomendasikan sebagai lahan RTH baru dengan cara melegalkan lahan tersebut sebagai lahan milik pemerintah.
4. Membuat regulasi baik itu PERDA/PERBUP tentang pentingnya sebuah RTH di kawasan perkotaan.

5. Menetapkan aturan satu data dan satu peta terkait RTH di kawasan perkotaan Kota Parepare di Kecamatan Bacukiki.
6. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya sebuah RTH ke setiap *stake holder* pemerintah setempat dan khususnya ke masyarakat agar dapat berperan penting dalam pemenuhan RTH di kawasan perkotaan Kota Parepare di Kecamatan Bacukiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, Iwan. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan KAPET: Suatu Studi pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare. [tesis]. Universitas Indonesia. URL: <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-90265.pdf>
- Carmona, M., Helath, T., Oc, T., Tiesdell, S. 2003. *Urban Spaces-Public Places : The Dimensions of Urban Design*. Oxford: Architectural Press.
- Chen, F. 2014. *Urban Morphology and Citizens's Life. Encyclopedia of Qualitif of Lifeand Well-Being Research*. Belanda: Springer.
- Dauhan, E.M., Rondonuwu, D.M., Wuisang C.E.V. 2019. *Analisis Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Ekosistem Perkotaan di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jurnal Spasial*, 6(1) : 78-89
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Mulyo, S. Andono. 2022. Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023. Dir. Tata Ruang dan Penanganan Bencana : Kementerian PPN/Bappenas.
- Erlinda, Novita. 2016. *Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model Flag. JEKP*, 7(1): 1-14. URL: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/416/318>
- Faisal dan Nasution, A.H. 2016. *Otonomi Daerah : Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. Jurnal Akuntansi*, 4(2) : 206-215. URL : <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/download/3370/3287>
- Hamas, F.A. dan Salahudin. 2021. Kebijakan Perencanaan Pembangunan : Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Kybernan* : 75-89. URL : <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1138>
- Iskandar, Johan. 2021. Pandemics and Sustainable Human Nature Relations: A Case Study in Baduy Community, South Banten, Indonesia. *4th International Conference on Sustainability Science 2020*. URL : <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124901001>
- Kasikoen, Ken Martina. 2011. *Tipologi Perkotaan di Kabupaten Cilacap. Jurnal Planesa*, 2(1) : 65-72
- Kasim, J.A., Yusuf, M.J., Zulhaidi, H. 2019. The Many Benefits of Urban Green Spaces. *CSID Journal of Infrastructure Development*, 2(1): 103-116. URL : <https://doi.org/10.32783/csid-jid.v2i1.47>
- Keputusan Presiden nomor 164 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
- Khalil, Baja, S., Azinikin, B., Hamzah, S., Alimuddin, I. 2020. *Typologi of Spatial Based Landslide Disaster Control in Pare-Pare City South Sulawesi, IJARET*, 11(10): 123-138. DOI : <https://10.34218/IJARET.11.10.2020.012>
- Kurniawan, Wahyu dan Maani, K.D. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl van Horn. JMIAP*, 1(4) : 67-78. URL : <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Larkham, P.J. 2002. *Misusing Morphology. Urban Morphology*, 6(2): 95-96
- Lestari, S.P., Noor, I., dan Ribawanto, H. 2019. *Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dalam upaya mewujudkan sustainable city. JAP*, 2(2): 381-387
- Liu, Qi, Hou, Li, Shaukt, S., Tariq, U., Riaz, R., Rizvi, S.S. 2021. *Perceptions of Spatial Patterns of Visitors in Urban Green Spaces for The Sustainability of Smart City. International Journal of Distributed Sensor Networks*, 17(8): 1-12. URL : <https://doi.org/10.1177/15501477211034069>
- Loeckx, Andre. 1986. *Note on The Methodology of Urban Analysis*. Leuven : Kathelieke Universiteit.

- Mandaka, Mutiawati, Ikaputra, Titisari, D. 2022 *Tipologi dan Morfologi Kota Bersejarah Lasem. Jurnal Arsitektur Pendapa*, 5(1): 58-75
- Menajang, G.M., Kindangen, J.I, Waan, J.O. 2016. *Morfologi Wilayah Peri Urban di Kecamatan Pineleng. SPASIAL*, 3(3) : 254-264
- Moudon, V. 1977. *Getting to Know The Built Landscape : Typomorphology.*
- Natsir, Ulfa. 2017. *Analisis Keunggulan Komoditi (Sektor) pada Kawasan Ekonomi Terpadu Se Ajatappareng. Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 7(1) : 25-34.
- Pradini, Purnama S. dan Gea, Lepiter. 2019. *Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Cappa Ujung Kota Pare-Pare. Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 4(1) : 1-18.
- Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pare-Pare tahun 2018 – 2023.
- Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
- Putra, N.W., Siwu, S.C., Amir, N. 2021. *Penataan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Calyptra*, 9(2): 1-15.
- Ramdhany. 2010. Analisis Potensi Ekonomi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-Pare di Sulawesi Selatan. [skripsi]. Program studi Ilmu Ekonomi : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rume, Tanjena dan Islam, S.M.D. 2020. *Environmental Effects of COVID-19 Pandemic and Potential Strategy of Sustainability. Heliyon*, 6(9): e04965. URL: [10.1016/j.heliyon.2020.e04965](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04965)
- Sakti, H.H. 2016. *Fenomena Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Pertumbuhan Aktivitas Perkotaan. Jurnal Plano Madani*, 70-79.
- Saputro, Anang. 2012. Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta. [skripsi]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sari, D.A.L., Widyawati, L.F., Pramesti, D. 2020. The Availability and Role of Urban Green Space in South Jakarta. ICoPS, 6-7 November 2019. Surakarta.
- Schultz, Norberg. 1979. *Genius Loci*. New York : Rizolli Internation Publications Sihaloho,
- Tumpal dan Muna, Naufa. 2010. *Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4(1): 75-101. URL : <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/download/150/108/>
- Sudarwani, M.M. dan Ekaputra, Y.D. 2017. Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 19(1): 47-56. URL : <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jtsp/article/view/10493/6452>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarto, Djoko. 1990. *Perkembangan Perencanaan Tata Ruang Kota di Indonesia*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan : ITB.
- Syauqi, Ahmad. 2020. *Jalan Panjang COVID 19. JKBS*, 1(1) : 1-15. URL : <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/115>
- Tallo, A.J., Pratiwi, Y., dan Astutik, I. 2014. *Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus : Sebagian Kecamatan Klojen, di Kota Malang). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(3) : 213-227.
- Teimori, R. dan Yigitcanlar, T. 2018. *An approach toward effective ecological planning : Quantitative analysis of urban green space characteristics. GJESM*, 4(2): 195-206 URL : <https://eprints.qut.edu.au/199595/>
- Trancik, R. 1986. *Finding Lost Space : Theory of Urban Design*. USA : John Wiley & Sons
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Vidler, Anthony. 1977. *The Third Typology*. New York : Princeton Architectural Press.
- Wahdaniyat, Hery. 2019. *Ruang Terbuka Hijau yang Masih Terpinggirkan di Indonesia*. Dirjend Cipta Karya: Kementerian PUPR.

URL: [https://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/detail\\_berita/565/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia](https://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/detail_berita/565/ruang-terbuka-hijau-yang-masih-terpinggirkan-di-indonesia)

Wulandari, Srim Rifardi, Rasyad, A., dan Yusmarini. 2018. *Status Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau sebagai Cadangan Karbon di Kota Pekanbaru. Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 25(2) : 73-80. URL : <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/23817/29503>

Yukhnovski, V. dan Zibtseva, O. 2019. *Normalization of Green Space as A Component of Ecological Stability of a Town. J.For.Sci*, 65(11) : 428-437. URL : <https://doi.org/10.17221/85/2019-JFS>

Yunus, H. Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Zahd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: ANDI